

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1891 K/Pid.Sus/2012
TENTANG PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN WEWENANG
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

OLEH

CORINA RATNA SARI

NIM. 115010107121021



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

ABSTRAK

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kasus dugaan korupsi Kasda yang dilakukan oleh mantan Bupati Kabupaten Sidoarjo yang saat itu menjabat pada periode 2005-2010, Win Hendrarso, bersama Nunik Ariyani dan Agus Dwi Handoko. Yang akhirnya dalam putusan Mahkamah Agung No.1891/Pid.Sus/2012 menyebutkan Win Hendrarso beserta Nunik Ariyani dan Agus Dwi Handoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dari hasil penelitian dengan metode yuridis normatif, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana, Hakim Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan atas perbuatan Terdakwa dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa. Serta dalam penentuan beban ganti rugi yang dijatuhkan untuk para Terdakwa yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Penjatuhan uang pengganti untuk kasus KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ini tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana yang dilakukan Secara Bersama-sama

ABSTRACT

In this paper will be discussed about the case of alleged corruption related regional treasury which is conducted by Ex Governor of Sidoarjo Regency, Win Hendrarso who served in the period 2005-2010, with Nunik Ariyani and Agus Dwi Handoko. Which eventually, in Supreme Court Decision No.1891 K/Pid.Sus/ 2012 mentions that Win Hendrarso has been proven that conducted corruption jointly with Nunik Ariyani and Agus Dwi Handoko. From the results of research by the normative juridical approach method, Writer obtains answers to exist problems that can be concluded before punished decision to the a crime, Supreme Court Judge must consider incriminating things and lightened things about act of Defendant and Supreme Court Judge punished Article 2 jo. Article 18 Act No. 31 year 1999 jo. Act No. 20 year 2001 about Corruption Eradication jo. Article 55 section (1) jo. Article 65 section (1) Criminal for act of Defendant. Also in determining compensation which is punished to all Defendants whose are mentioned in Supreme Court Decision No. 1891 K/Pid.Sus/2012, depends on Article 4 section (1) Supreme Court Regulation No. 5 year 2014 about Additional Punishment of Compensation in Corruption, Compensation for this case of CORRUPTION WHICH IS CONDUCTED JOINTLY can't be punished through joint ability.

Keywords : Corruption, Abuse of Authority, Crime which is conducted jointly

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang ini kita sudah tidak asing lagi mengenal hal yang disebut dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk bukan perbuatan hukum yang melawan hukum, “bukan perbuatan hukum yang melawan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan untuk terjadi oleh subjek hukum.”¹ Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus. Tidak ada definisi yang cukup sesuai dari tindak pidana korupsi. Tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.²

Indonesia, korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, seperti, korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai budaya korupsi. Tentu saja yang dimaksud Klitgaard di sini bukan pada hakikat keberadaan budaya atau semua orang Indonesia melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang dimaksud Klitgaard sebagai budaya, karena sudah dianggap biasa, seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk mempercepat urusan, seseorang biasa memberikan uang pelicin atau kebiasaan memberikan uang rokok (*bakshish system*), serta memberikan fasilitas dan hadiah. Kondisi itu menjadi berkembang karena selama ini masyarakat dalam interaksi tersebut, mendapat faedah bagi dirinya, hal ini menyebabkan keengganan sebagian besar warga masyarakat untuk melaporkan oknum pejabat negara, birokrat, konglomerat, dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi.³

Menurut Romli Atmasasmita, “tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*.”⁴

Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara

¹ Marwan Muhwan Hariri, **PENGANTAR ILMU HUKUM**, PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012, hal. 57

² Aziz Syamsuddin, **TINDAK PIDANA KHUSUS**, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2011, hal. 15

³ Marwan Effendy, **SISTEM PERADILAN PIDANA (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)**, REFERENSI, Jakarta, 2012, hal. 82

⁴ Ermansjah Djaja, **MEREDESAIN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)**, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2010, hal. 25-26

Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Berapa lama pidana penjara bergantung dari tuduhan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan majelis hakim.

Perbuatan-perbuatan itu dikelompokkan sebagai berikut :

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian negara :
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan Negara adalah Korupsi;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi;
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap :
 - a. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi;
 - b. Menyuap pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi;
 - c. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi;
 - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi;
 - e. Menyuap hakim adalah korupsi;
 - f. Menyuap advokat adalah korupsi;
 - g. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi;
 - h. Hakim menerima suap adalah korupsi;
 - i. Advokat menerima suap adalah korupsi;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan :
 - a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi;
 - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi;
 - c. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi;
 - d. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi;
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan :
 - a. Pegawai negeri memeras adalah korupsi;
 - b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupsi;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang :

- a. Pemborong berbuat curang adalah korupsi;
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;
 - c. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;
 - d. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;
 - e. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;
 - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi;
6. Korupsi yang terkait dengan bentukan kepentingan dalam pengadaan :
 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi :
 - a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah Korupsi.
 - b. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁵

Hal yang akan dibahas di sini adalah mengenai korupsi yang terkait dengan kerugian negara melalui cara menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh mantan Bupati Kabupaten Sidoarjo yang saat itu menjabat pada periode 2005-2010, Win Hendrarso.

Posisi kasus yang diberitakan oleh inilah.com, kasus dugaan korupsi Kasda Sidoarjo 2005 sebesar Rp 2,4 miliar menyeret tiga tersangka. Terdiri dari mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Anggota DPRD Sidoarjo Nunik Ariyani yang kala itu menjabat Kepala Dispenda Sidoarjo, dan staf Dispenda Sidoarjo Agus Dwi Handoko.

Ketiganya dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap hilangnya dana kasda pada tahun anggaran 2005 dan 2007. Oleh Pengadilan Tipikor, Win Hendrarso divonis 1 tahun penjara namun yang bersangkutan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim. Dalam prosesnya, akhirnya, Pengadilan Tinggi memutus bebas Win Hendrarso karena menilai tidak ada unsur kerugian negara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).⁶

Hampir dua tahun proses pengajuan kasasi, akhirnya MA memutuskan vonis 5 tahun penjara kepada Win Hendrarso dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp 2 milyar. Dalam putusan Mahkamah Agung No.1891/Pid.Sus/2012 menyebutkan Win Hendrarso terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

⁵ J.E. Sahetapy, 2013, *Komisi Hukum Nasional Indonesia*, http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621 diakses pada 11 November 2014

⁶ Inilah.com, 2013, *Mantan Bupati Sidoarjo Mendekam di Penjara*, <http://nasional.inilah.com/read/detail/2039712/mantan-bupati-sidoarjo-mendekam-di-penjara> diakses pada 2 Desember 2014

Mahkamah Agung memutus Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dari uraian di atas, dalam menjatuhkan suatu putusan, Hakim harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan untuk memutus suatu perkara dan memberikan implikasi hukum terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa dalam suatu kasus. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari itu terdorong untuk mengkaji putusan yang dijatuhkan terhadap mantan Bupati Kabupaten Sidoarjo, Win Hendrarso terkait kasus korupsinya yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara melakukan analisa yuridis terkait Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 yang diberikan padanya.

MASALAH/ISU HUKUM

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama ke dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012?
2. Bagaimana menentukan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan untuk para Terdakwa yang disebutkan ada pada Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012?

PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, “yang dimaksudkan dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.”⁷ penulisan yang akan dilakukan dengan menganalisa suatu Putusan Mahkamah Agung yang mempunyai maksud dan tujuan untuk dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai konsep teoritis.

⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L, **PENELITIAN HUKUM NORMATIF (Suatu Tinjauan Singkat)**, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2001, hal. 23

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pengkajian hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga-lembaga yang berwenang. Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012.

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Untuk pendekatan kasus dalam skripsi ini akan menggunakan penjelasan singkat perkara dan putusan dari hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 serta dari Putusan lain yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 .

Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bahan-bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012, dan Putusan lain yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 (Putusan No. 25/Pid.Sus/2011/PN.SURABAYA, Putusan Mahkamah Agung No. 1837 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1420 K/Pid.Sus/2012).

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku, penelusuran internet, dan pendapat dari para sarjana hukum yang ahli dalam bidangnya berkaitan dengan penelitian ini.

Penelusuran bahan hukum primer dan sekunder dapat dilakukan melalui perolehan putusan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum pada perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, PDIH, serta penelusuran melalui internet.

Pengelolaan dan analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teknik interpretasi ekstensif.

Teknik Interpretasi Sistematis, dalam skripsi ini, Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 kemudian mengkajinya ke dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Teknik Interpretasi Ekstensif, dalam skripsi ini, Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 kemudian mengkajinya ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dan dibantu dengan buku-buku yang mempunyai literatur-literatur hukum.

Definisi konseptual yang digunakan dalam skripsi ini adalah definisi dari putusan, Mahkamah Agung, tindak pidana, korupsi, menyalahgunakan kewenangan, penyertaan (*deelneming*), dan perbarengan.

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama ke dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012

Perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dikarenakan memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;
7. Pengenaan pidana tambahan;

Kemudian dalam dakwaan Subsidair, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dikarenakan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
7. Pengenaan Pidana Tambahan;

Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama ke dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana, Hakim Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan atas perbuatan Terdakwa seperti berikut ini:

- Hal-hal yang memberatkan :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Win Hendrarso, M.Si bersama-sama dengan saksi Dra. Nunik Ariyani, M.Si dan saksi Agus Dwi Handoko, S.E. serta Soeradji tersebut di atas telah merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.309.437.500,00 sebenarnya tidak terbukti kebenarannya dan menguntungkan saksi Arly Fauzi, S.H. sebesar Rp. 309.437.500,00 telah terbukti ;
 2. Bahwa Terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00;
- Hal-hal yang meringankan sebagai berikut semuanya telah terbukti :
 1. Terdakwa telah mengabdikan sebagai PNS di Pemkab;
 2. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Sesuai dengan Dasar Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 ini, dinyatakan kesetujuan akan hal penjatuhan Pasal 2 sesuai atas perbuatan

Terdakwa tersebut. Karena ternyata seluruh unsur Dakwaan Primair itu telah terbukti, yaitu unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri/orang lain/korporasi, merugikan keuangan negara/perekonomian negara, sehingga ada penyertaan serta gabungan perbuatan. Dalam Putusan ini, khususnya mengenai unsur “setiap orang” pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150 bersifat umum dan pada Pasal 3 bersifat khusus. Pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun bukan pegawai negeri, sedangkan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 3. Dalam hal ini Terdakwa sudah memenuhi unsur setiap orang dalam Pasal 2, yang mana masuk dalam kategori penyelenggara negara atau pegawai negeri. Apabila unsur setiap orang dalam Pasal 2 sudah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam Pasal 3 tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan.

B. Menentukan Jumlah Uang Pengganti Yang Dijatuhkan Untuk Para Terdakwa Yang Disebutkan Ada Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012

Dalam menentukan jumlah uang pengganti atas kasus KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukumnya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tersebut dibuat atas pertimbangan dari Pasal 18 ayat (1) huruf Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan perlu dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah dikarenakan dalam praktiknya, apabila Pengadilan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sekaligus ditetapkan juga maksimum penjara pengganti yang harus dijalani terpidana jika tidak melunasi uang pengganti tersebut, dan juga karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai penentuan besaran pengganti dari uang pengganti tersebut, terjadi disparitas penentuan maksimum penjara pengganti.

Mengenai penentuan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan untuk para Terdakwa yang disebutkan ada pada Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Penjatuhan uang pengganti untuk kasus KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ini tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng sudah tepat dalam penerapannya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Analisa yuridis yang dilakukan oleh Penulis mempunyai hasil kesimpulan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama ke dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012, Hakim Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini:

- Hal-hal yang memberatkan :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Win Hendrarso, M.Si bersama-sama dengan saksi Dra. Nunik Ariyani, M.Si dan saksi Agus Dwi Handoko, S.E. serta Soeradji tersebut di atas telah merugikan Keuangan Daerah Kabupaten

Sidoarjo sebesar Rp. 2.309.437.500,00 sebenarnya tidak terbukti kebenarannya dan menguntungkan saksi Arly Fauzi, S.H. sebesar Rp. 309.437.500,00 telah terbukti ;

2. Bahwa Terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00;
 - Hal-hal yang meringankan sebagai berikut semuanya telah terbukti :
 1. Terdakwa telah mengabdikan sebagai PNS di Pembab;
 2. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan penentuan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan untuk para Terdakwa yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Penjatuhan uang pengganti untuk kasus KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ini tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.

SARAN

Bagi Hakim Mahkamah Agung, dalam memutus suatu perkara lainnya di kemudian hari, agar lebih mempertimbangkan alasan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penggunaan pasal-pasal yang tertuang dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, sebelum membuat Dasar Pertimbangan akan suatu putusan dan juga lebih detail lagi dalam membuat Dasar Pertimbangan, sehingga dapat lebih bijak dalam menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai untuk Terdakwa dalam suatu perkara dan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lebih baik dalam mengimplementasikan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 387, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150, agar Korupsi semakin terhindarkan dan untuk benar-benar membuat para Koruptor jera dapat diberlakukan pula mengenai istilah hukuman “memiskinkan Koruptor” sesuai dengan besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2011

Ermansjah Djaja, **Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)**, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2010

Marwan Effendy, **Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)**, REFERENSI, Jakarta, 2012

Marwan Effendy, **Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)**, REFERENSI, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2001

Wawan Muhwan Hariri, **Pengantar Ilmu Hukum**, PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012

UNDANG-UNDANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

WEBSITE

J.E. Sahetapy, 2013, *Komisi Hukum Nasional Indonesia*,
http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240:

[korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621](#), diakses pada 11 November 2014

Inilah.com, 2013, *Mantan Bupati Sidoarjo Mendekam di Penjara*,
<http://nasional.inilah.com/read/detail/2039712/mantan-bupati-sidoarjo-mendekam-di-penjara> diakses pada 2 Desember 2014

Website Mahkamah Agung RI

<http://jdih.mahkamahagung.go.id/v2/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/1.-Peraturan-Mahkamah-Agung/Tahun-2014/>